

**SIMPOSIUM KEBUDAYAAN INDONESIA – MALAYSIA ( SKIM X )  
Kuala Lumpur 29 – 31 Mei 2007**

**PERSPEKTIF INDUSTRI PENGEMUKAN  
SAPI POTONG IMPOR (*FEEDLOT*) DI INDONESIA**

**OLEH :**

**Rochadi Tawaf  
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**ABSTRAK**

Pangsa pasar daging sapi di Indonesia masih sangat terbuka luas bagi industri peternakan sapi potong, dengan konsumsi protein hewani yang baru mencapai 4,7 gram/kapita/hari masih di bawah standar norma gizi (menurut FAO 6 gram/kapita/hari). Untuk meningkatkan konsumsi protein hewani 1 gram/kapita/hari, maka dibutuhkan daging sekitar 1.265,8 ton/hari identik dengan 10.548 ekor sapi yang harus dipotong per hari atau 3,85 juta ekor per tahun, sedangkan populasi sapi di Indonesia hanya sekitar 11,9 juta ekor. Jika saja kebutuhan tersebut hanya dipenuhi dari produksi domestik, maka dalam jangka waktu beberapa tahun populasi ternak sapi di Indonesia akan punah.

Bisnis Feedlot yang menggunakan sapi bakalan impor memberikan *benefit* sebesar 35,8%. Nilai BCR ini sangat tinggi, mengingat lama penggemukan rata-rata hanya 3 bulan, bahkan untuk sapi *trading* lebih singkat lagi yaitu sekitar 12 hari. Dalam satu tahun besarnya manfaat dari impor sapi sekitar 107,4 % dari biaya yang dikeluarkan untuk mengimpor sapi. Besarnya nilai tersebut lebih besar dari suku bunga bank komersial yang hanya sekitar 25 %.

Usaha penggemukan sapi potong di Indonesia sangat prospektif untuk dikembangkan. Dalam rangka pengembangan agribisnis berbasis sapi potong di Indonesia harus berpedoman kepada, azas kelestarian sumberdaya ternak nasional, azas keseimbangan suplai demand dan azas kemandirian menuju kecukupan daging bagi masyarakat. Dalam menghadapi pasar global, perspektif bisnis feedlot harus pula berasaskan perdagangan yang berkeadilan (*fair trade*) dan kesetaraan (*equal treatment*) antara peternak di dalam negeri dan di negara lain. Perlunya kebijakan pemanfaatan teknologi dan sumberdaya manusia, sehingga produksi domestik akan memiliki daya saing tinggi melalui upaya mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

---

***Kata Kunci : Perspektif, Feedlot, daging sapi***

## **PERSPECTIVE OF FEEDLOT INDUSTRY IN INDONESIA**

**By : Rochadi Tawaf**

**Faculty of Animal Husbandry Padjadjaran University**

### **Abstract**

Beef market share in Indonesia is very big for beef cattle industry, related to very low protein consumption per capita (4.7 gram/cap/day while FAO standard is 6 gram/cap/day). If the consumption increases 1 gram/cap/day, it requires beef around 1,265.8 tons/day or 10,548 heads beef cattle to be slaughtered per day or 3.85 million beef cattle per years. On the other hand, cattle population in Indonesia is only 11.9 million heads. If the beef demand is only supplied from domestic production, so in the short term the beef cattle will disappear from Indonesia.

Feedlot business using imported cattle from abroad (Australia) provided BCR 35.5%. The BCR very high due to the maximum day on feed about 3 months, term of payment is 12 days. Benefit of this business is 107.4 % per year from the total import cost, which is bigger than commercial bank interest (25)%

Feedlot business in Indonesia is very prospective. Beef Cattle Agribusiness development in Indonesia should be based on: sustainability of local cattle resources, the balance of supply and demand for beef self sufficient Facing the global market, government policy should be based on: fair trade and equal treatment of both local and abroad cattle farmers. Besides, technology application and skill are needed to make the domestic production has highly competitive advantages.

Key words: Perspective, feedlot, beef cattle

## Pendahuluan

Salah satu tolok ukur untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara adalah tingkat konsumsi protein hewani masyarakatnya. Konsumsi protein hewani masyarakat di Indonesia ternyata baru mencapai sekitar 4,7 gram/kapita/hari (Dirjen Peternakan, 2002). Kontribusi daging sapi sekitar 1,7 kg/orang/tahun terhadap total konsumsi protein hewani asal ternak. Jika jumlah penduduk Indonesia sekitar 220 juta orang, maka setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan daging sapi, harus dipotong sekitar 1,5 juta ekor sapi lokal untuk menghasilkan sekitar 350 ribu ton daging yang diproduksi didalam negeri ditambah dengan mendatangkan sapi bakalan dari Australia tidak kurang dari 350 ribu ekor dan impor daging sapi sekitar (30-50) ribu ton. Jika terjadi peningkatan populasi penduduk sekitar 2 % per tahun dengan kemampuan konsumsi daging sapi masyarakat hanya naik 1 gram/kapita/hari (kondisi ini pun masih di bawah norma gizi). Maka dibutuhkan daging sekitar 1.265,8 ton/hari identik dengan 10.548 ekor sapi yang harus dipotong per hari atau 3,85 juta ekor per tahun, sedangkan populasi sapi di Indonesia hanya 11,9 juta ekor, maka dalam jangka waktu beberapa tahun populasi ternak sapi di Indonesia akan punah.

### Kesenjangan Suplai Demand

Berdasarkan pada asumsi data tersebut, permintaan daging sapi di Indonesia menunjukkan angka yang semakin meningkat. Menurut Tjeppey D. Soedjana (2006), bahwa setiap tahun akan terjadi peningkatan permintaan produksi yang belum mampu diimbangi oleh ketersediaannya di dalam negeri (Tabel 1. di bawah).

Tabel 1 : Prediksi Neraca Kebutuhan Daging sapi di Indonesia (2005-2010)

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Penduduk (jta orang)	219,7	222,9	226,3	229,7	233,2	236,7
2	Pertumb. penddk (%)	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
3	Kons daging sapi (Kg/Kap/Th)	1,72	1,79	1,86	1,94	2,01	2,09
4	<b>Kons. daging (000 Ton)</b>	<b>378,93</b>	<b>399,66</b>	<b>421,52</b>	<b>444,58</b>	<b>468,90</b>	<b>494,55</b>
5	Senjang produksi (000 ton)	107,09	111,22	107,22	11,597	45,17	10,92
6	Senjang produksi (%)	28,26	27,83	25,44	26,09	9,63	2,21
7	Setara sapi hidup (000 ek)	864,22	897,62	865,33	935,94	364,55	88,09
8	Betina prod. (000 ek)	1.389,9	1.443,6	1.391,6	1.505,2	586,3	141,7
9	Pop. Ideal (000 ek)	11.910,1	13.468,8	14.645,2	14.938,3	15.593,9	16.709,4
10	Senjang populasi (%)	12,58	11,48	10,10	10,75	3,85	0,85

Sumber : Tjeppey D. Soedjana (2006)

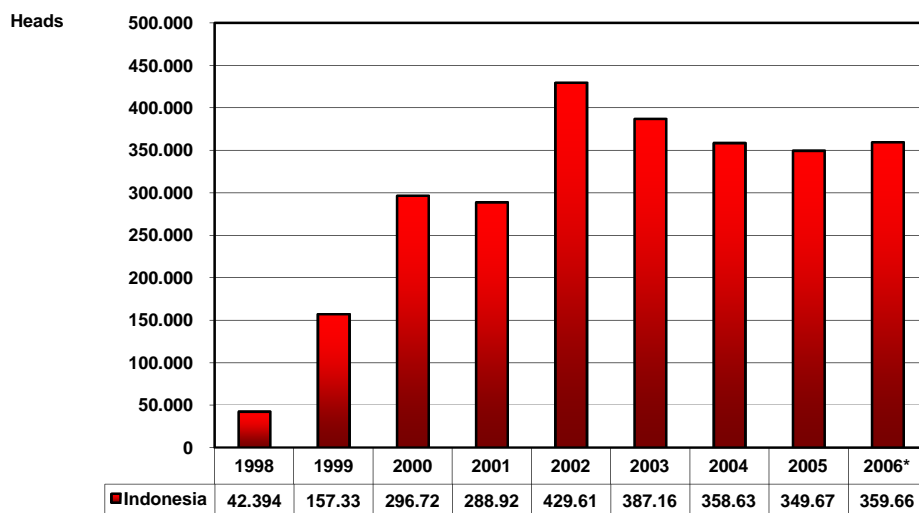
Dari Tabel diatas tampak bahwa terjadi peningkatan kekurangan daging setiap tahun, untuk tahun 2005 harus disuplai paling tidak setara sekitar 500 ribuan ekor sapi siap potong. Seandainya jumlah tersebut tidak dapat dipenuhi oleh impor dalam

bentuk sapi dan daging sapi, maka dikhawatirkan akan terjadi pengurasan populasi sapi lokal, seperti yang telah terjadi sekarang ini.

### Impor Sapi

Perkembangan impor sapi bakalan dari Australia selama ini, ternyata telah mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan peternakan sapi potong. Penurunan populasi ternak sapi lokal yang cukup tajam dapat dicegah dengan masuknya impor sapi bakalan. Sampai dengan tahun 2006 impor sapi potong dari Australia mencapai jumlah tertinggi 429.615 ekor per tahun pada tahun 2002 dan impor daging sekitar 50.000 Ton pertahun atau setara dengan sekitar 500.000 ekor sapi (asumsi jika dari satu ekor sapi diperoleh 100 kg daging murni).

Dari sejumlah sapi yang diimpor tersebut, dapat dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan akan daging sapi di dalam negeri telah di substitusi oleh impor sapi bakalan dan daging sapi yang cukup besar jumlahnya dalam kurun waktu yang relatif singkat. Walaupun pada periode krisis ekonomi Indonesia hanya mampu melakukan impor sapi sekitar 42.394 ekor, tetapi pada beberapa tahun terakhir (pada tahun 2002) jumlah ternak yang diimpor telah mampu melampaui jumlah sapi yang diimpor sebelum krisis, yaitu sekitar 429,6 ribuan ekor (lihat Grafik di bawah).



Grafik : Jumlah Sapi yang di Impor dari Australia (1998-2005)  
(sumber MLA, 2006)

Jika saja substitusi ini tidak dilakukan, maka akan terjadi pengurasan populasi sapi potong di dalam negeri, sebagai akibat kuatnya daya tarik permintaan akan daging.

### Tolok Ukur Perkembangan Peternakan Sapi Potong

Tingginya permintaan terhadap daging sapi yang tidak diimbangi dengan penawarannya akan mengakibatkan makin tingginya harga daging di tingkat konsumen, serta pengurasan populasi sapi di dalam negeri. Berbagai cara untuk

mengetahui apakah pembangunan peternakan sapi potong ini telah berkembang cukup baik, atau sebaliknya? selain dengan melihat data kuantitatif yang ada, juga dapat diketahui pula oleh berbagai kondisi lapangan.

Suatu cara yang dapat digunakan untuk melihat indikasi kegawatan situasi peternakan sapi potong lokal, yaitu dengan cara melihat dari tahapan perkembangan impor *semen beku atau embryo transfer, sapi betina bibit, sapi bakalan, dan daging* sebagai berikut :

1. **Tahap pertama**, jika yang diimpor adalah *semen beku* atau *embryo transfer*. Menunjukkan bahwa pembangunan peternakan sapi potong lokal, masih prospektif. Kondisi ini sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan mutu genetik sapi lokal, sehingga bobot sapi lokal meningkat, dampaknya terhadap jumlah sapi yang dipotong dan kualitas serta kuantitas daging yang diperoleh akan memenuhi kebutuhan permintaan.
2. **Tahap kedua**, jika yang diimpor adalah sapi betina bibit, menandakan bahwa ada gejala bibit betina sapi lokal mulai berkurang, dan tingkat produksi (*suplai*) yang dihasilkannya dibandingkan dengan permintaan (*demand*) menunjukkan nilai negatif. Kondisi ini sebagai akibat banyaknya ternak betina produktif yang turut terpotong, karena lemahnya fungsi kontrol pemerintah di tingkat jagal, dan kuatnya permintaan akan daging. Disisi lain, pengawasan pengaliran ternak antar daerah tidak mampu mendeteksi maksud dan tujuan pengaliran ternak.
3. **Tahap ketiga**, jika yang diimpor adalah sapi bakalan penggemukan, mencirikan bahwa kemampuan suplai sapi dalam negeri (produksi sapi lokal) **sudah lampu kuning**. Hal ini disebabkan ketersediaan bakalan sapi lokal sudah sangat sulit diandalkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Biasanya ditandai pula dengan bobot potong yang turun (misalnya dari rata-rata 400 kg per ekor menjadi 300 kg per ekor), walaupun laporan pemerintah menyatakan jumlah ekornya tidak turun. Sehingga laporan ini akan menggecoh kebijakan pemerintah sendiri.
4. **Tahap keempat**, jika yang diimpor makin meningkat volumenya dalam bentuk sapi siap potong atau daging (karkas, boneless, dsb), kondisi ini **menunjukkan lampu merah** bagi pembangunan peternakan sapi potong. Karena tanpa kehadiran sapi dan daging impor, pengurusan populasi sapi lokal akan terjadi sangat cepat. Artinya daya tarik demand yang sangat kuat, diimbangi kemampuan reproduksi (kelahiran) dan produksi ternak **yang rendah**. Rendahnya kemampuan produksi dan reproduksi ini terutama disebabkan kondisi sosial ekonomi masyarakat peternak, kebijakan pemerintah, dan pelaksana terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, impor dalam bentuk daging nilai tambahnya bagi masyarakat relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan sapi hidup. Impor

Jika melihat pada indikator kondisi usaha ternak sapi potong lokal di Indonesia, posisi saat ini, baru sampai pada tahapan ke ketiga yaitu impor bakalan penggemukan, artinya posisi *lampu kuning* bagi pembangunan peternakan sapi potong. Bisnis sapi impor sempat terpuruk, di awal krisis ekonomi yang lalu yaitu sekitar pertengahan tahun 1997 sampai dengan 1998, para pengusaha importir hanya mampu mengimpor sekitar 42,3 ribu ekor, sedangkan tahun sebelumnya (1996)

mereka mampu mengimpor sekitar 388.974 ekor, namun menurut data yang berhasil dicatat APFINDO, mulai tahun 1999 menjadi 157.338 ekor, tahun 2000 menjadi 296.723 ekor, tahun 2001 menurun sedikit menjadi 288.922 ekor dan pada tahun 2002 sekitar 429.619 ekor. Indikasi cepat terjadinya *recovery* pada impor bakalan menunjukkan bahwa bisnis ini masih sangat prospektif.

Para pengusaha *Feedlot* sapi potong sebenarnya telah membantu para pengusaha pengecer daging dengan memberikan fasilitas kredit dalam setiap transaksinya, manakala perbankan sulit mengucurkan kredit. Para pengusaha *Feedlot* saat ini biasa memberikan pembayaran kredit selama sekitar 7 – 10 hari, bila sehari di Jabotabek, di potong sapi ex impor sebanyak 250 ekor dengan harga Rp. 6 Juta per ekor, maka kredit yang diberikan kepada para pengusaha kecil sekitar Rp. 1,5 Milyar per hari, jika 10 hari rata-rata sekitar Rp. 15,- Milyar para pengusaha *Feedlot* memberikan fasilitas kreditnya. Melihat kenyataan ini, sebenarnya bisnis sapi impor mampu membantu para pengusaha kecil dan petani untuk memperoleh nilai tambah. Selain itu, usaha ini memberikan *multiplying effect* yang cukup melebar. Antara lain, bisnis kulit, tulang, darah, lemak dan pupuk yang dihasilkan oleh sapi yang diimpor, serta sejumlah tenaga yang dapat diserap. Apabila dilihat peranannya, bisnis sapi impor ini jelas-jelas membantu mengendalikan kemungkinan terkurasnya populasi ternak lokal, memberikan efek ganda bagi kehidupan masyarakat di pedesaan, selain berupa fasilitas kredit murah bagi pedagang dan peternak plasma, juga dalam penyediaan protein hewani bagi masyarakat.

### **Australia Eksportir Tunggal Bagi Indonesia**

Melihat perjalanan bisnis sapi impor selama ini, Indonesia harus segera mulai menyiapkan diri untuk melakukan swa sembeda pengadaan bakalan sapi lokal secara sungguh-sungguh. Sebab, jika dihitung berdasarkan suplai demand dan pengadaan bahan baku sapi bakalan bagi industri *Feedlot* di Indonesia yang berasal dari berbagai negara harus sangat diwaspadai. Mengingat Indonesia sebagai negara yang bebas penyakit PMK (FMD), hanya bisa mengimpor dari negara-negara yang diizinkan melakukan ekspor sapi ke Indonesia. Yaitu negara-negara yang juga terbebas dari penyakit PMK, antara lain Australia, New Zealand dan Amerika Serikat. Seperti diketahui bahwa Amerika Serikat dan New Zealand sangat kecil sekali kemungkinannya untuk melakukan ekspor sapi bakalannya ke Indonesia. Sebab utama, selain faktor jarak yang cukup jauh juga disebabkan jenis sapi yang dimiliki adalah bangsa sapi yang berasal dari negara bermusim empat, sehingga tidak cocok bagi Indonesia yang berada di daerah tropis. Selain itu, di penghujung tahun 2003 yang lalu, di USA ditemukan penyakit BSE pada seekor ternak sapi perah. Dampaknya, Indonesia telah melarang sementara impor sapi dan daging dengan segala produk ikutannya. Akibatnya, hanya satu negara saja yang mungkin melakukan impor sapi ke Indonesia yaitu Australia. Kenyataan ini, akan merupakan kondisi yang sulit bagi negeri ini, bila tidak mampu mengatasi penyediaan daging bagi rakyatnya yang 200 juta lebih. Hal ini pula yang akan menyebabkan Indonesia akan menjadi bulan-bulanan Australia dalam memasarkan sapi. Tentunya, jika mereka mengalami kesulitan pemasaran utamanya ke Timur Tengah dan negara-negara asia pasifik lainnya, baru memperhatikan Indonesia. Hal ini lebih

disebabkan kondisi perekonomian negeri ini tidak lebih baik dari negara-negara pengimpor sapi dari Australia lainnya.

Industri sapi potong di Australia, dengan populasi sekitar 29 juta ekor, setiap tahun memotong sekitar 4 juta ekor bagi industri daging yang diekspor dan 3 juta ekor bagi keperluan dalam negerinya, sedangkan yang diekspor dalam bentuk sapi hidup hanya sekitar 900 ribuan ekor. Dari sejumlah tersebut, potensi pasar Australia tertuju ke Indonesia sekitar 300 – 400 ribuan ekor, Philipina sekitar 100 – 200 ribuan ekor, Mesir sekitar 100 – 200 ribuan ekor, dan negara lainnya (Brunei, Jepang, Jordan, Libya, Malaysia dan Meksiko) rata-rata dibawah 100 ribuan ekor. Bisa dibayangkan, alternatif yang demikian terbukanya bagi pasar sapi dari Australia dan **jika perekonomian dunia stabil, kemungkinan besar Indonesia tidak akan mampu membeli sapi dari Australia** dengan standar kualitas yang dikehendaki. Hal ini dikarenakan, harga sapi akan melambung tinggi, sementara daya beli masyarakat relatif lebih rendah daripada negara lain. Selain itu, telah dibuktikan pula bahwa dalam perdagangan sapi akhir-akhir ini, Indonesia sepertinya merupakan *keranjang sampah* bagi ekspor sapi bakalan Australia. Melihat kenyataan tersebut, sepantasnya peternakan sapi potong di dalam negeri harus segera dibenahi. Terutama jika ingin memenuhi kebutuhan gizi bagi sekitar 200 juta rakyat yang masih mengkonsumsi daging di bawah standar norma gizi. Kemungkinan kebanggaan bebas PMK (penyakit mulut dan kuku) di Indonesia, akan menjadi bumerang bagi penyediaan kecukupan daging nasional. Hal tersebut dikarenakan, Indonesia tidak akan mampu melakukan impor daging maupun sapi dari negara-negara yang belum bebas PMK, sedangkan di sisi lain, Australia akan *mempermainkan* harga karena negara importir lainnya mampu membeli dengan harga yang lebih tinggi.

### ***Fair Trade (Perdagangan Yang Berkeadilan)***

Kendala dan tantangan tersebut harus segera dijawab sebagai peluang, membangun industri peternakan sapi potong yang berdaya saing. Langkah strategis yang harus dilakukan yaitu dengan konsep dasar merubah keunggulan komparatif yang kita miliki dalam bentuk pasar dan bahan baku pakan serta usaha ternak potong ini menjadi keunggulan kompetitif, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahanya. Kesulitan yang dihadapi industri ini, karena pemerintah selama ini telah melakukan diskriminasi tindakannya dalam mengembangkan peternakan sapi potong di dalam negeri, bila dibandingkan dengan usaha sejenis di negeri lain. Misalnya, dalam perdagangan global, bisnis ini melakukan transaksinya secara tranparan, yaitu dengan timbangan berat. Selain itu, industri ini telah menggunakan teknologi pemacu hormon pertumbuhan untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Sedangkan di dalam negeri, sebagian besar transaksi jual-beli sapi potong dilakukan dengan cara taksir sehingga menimbulkan banyaknya penikmat bebas dalam perdagangan. Belum lagi berlakunya otonomi daerah, telah menyebabkan pula peningkatan berbagai pungutan (retribusi) yang mengakibatkan biaya tinggi. Penggunaan pemacu pertumbuhan pun di negeri ini sepertinya menjadi haram digunakan. Akibat lanjut, para peternak yang dirugikan karena produktivitasnya rendah dan produknya menjadi tidak berdaya saing. Sebenarnya pembenahan yang paling dasar bertumpu kepada UU 6 tahun 1967 tentang pokok-pokok peternakan dan kesehatan hewan yang harus segera direvisi. Sehingga

diskriminasi perlakuan ini dapat dihindari, iklim kondusif yang diperlukan adalah kesetaraan tindakan (*equal treatment*) antar pelaku bisnis di dalam dan luar negeri. Jika saja pemerintah bersama DPR serta para pelaku bisnis (peternak dan pengusaha) menata ulang berbagai kebijakan pendukung, sepertinya impor sapi dari Australia suatu saat akan menurun bahkan mungkin berhenti dengan sendirinya. Karena peternak didalam negeri akan bergairah untuk memenuhi kebutuhan industri ini.

Konsep perdagangan yang berkeadilan, dalam perdagangan bebas hendaknya diterapkan oleh pemerintah untuk melindungi peternak sapi potong di dalam negeri. Saat ini Indonesia terbebas dari PMK (penyakit mulut dan kuku) dan BSE, oleh karenanya produk daging yang diimpor pun harus dari negara-negara yang terbebas penyakit tersebut. Demikian halnya mengenai kehalalan, penggunaan teknologi dan modal investasi yang digunakan. Kesemuanya harus berkeadilan dengan yang digunakan peternak di negeri ini. Jangan sampai, *edibel oval* (jeroan seperti jantung, hati dsb) yang tidak halal turut masuk ke Indonesia tanpa kendali. Hal ini dikarenakan komoditi tersebut tuna nilai di negara exportir. Jika ini, dilakukan kompetisi secara terbuka, tentunya produk daging yang berasal dari dalam negeri tidak akan mampu bersaing. Oleh karenanya, pemerintah harus mampu menerapkan kebijakan proteksi melalui *non tariff barrier* yang masih diperbolehkan oleh kebijakan dalam perdagangan bebas.

### **Kendala Otonomi Daerah**

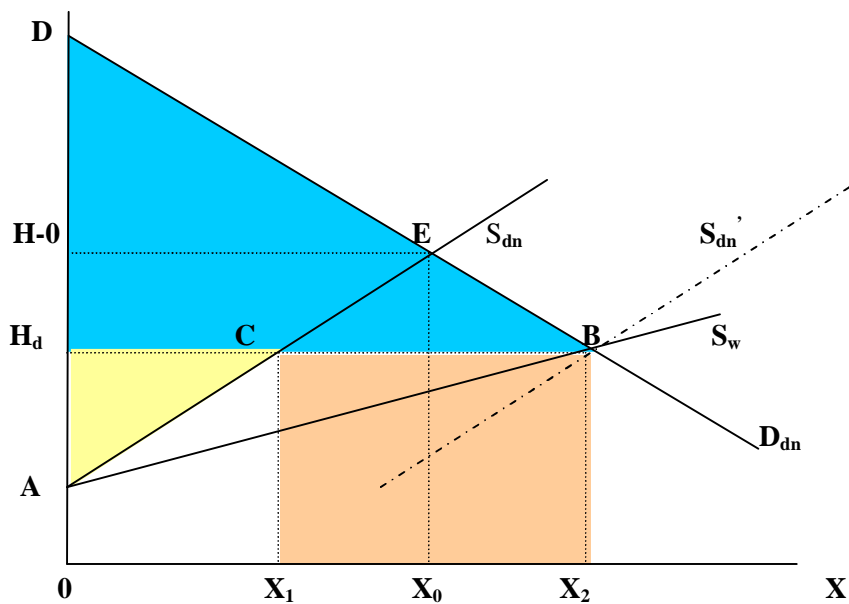
Implementasi otonomi daerah telah banyak dilaksanakan oleh pemerintahan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Yang paling mudah dalam rangka swadana, Pemda melakukan pungutan dengan berbagai cara kepada setiap pengusaha, akibatnya sering-sering timbul duplikasi pungutan. Kenyataan ini masih dianggap hal yang wajar bila Pemda turut memberikan andil dalam pelayanan pembinaan bagi para pengusaha. Tetapi ada pungutan retribusi, dimana Pemda tidak memberikan pelayanannya. Hal tersebut yang mengakibatkan biaya tinggi bagi kelangsungan usaha ternak di daerah. Kejadian ini merupakan akibat dari kebiasaan masa lalu dimana Pemda berada pada *posisi tangan dibawah*, karena dana pembangunan daerah dialirkan dari pemerintah pusat. Padahal peluang perolehan dana cukup besar jika Pemda mampu beraliansi strategi dengan para pengusaha (swasta dan koperasi) dalam rangka pengembangan peternakan sapi potong di daerahnya. Selain masalah retribusi tersebut, rasa-rasanya kendala yang akan menjadi hambatan terhadap pembangunan peternakan sapi potong adalah masalah kelembagaan pemerintah pusat dan daerah serta kebijakan dasar berupa UU No.6/1967 tentang pokok-pokok peternakan dan kesehatan hewan yang harus segera diganti karena sudah terlalu banyak materi UU tersebut yang tidak sesuai lagi dengan keadaan masa kini. Selain itu dari sisi kelembagaan pembangunan, di tingkat pemerintah pusat, struktur organisasi Departemen Pertanian ternyata berbeda dengan di daerah (Propinsi, Kabupaten maupun Kota). Struktur organisasi Dinas teknis sub sektor peternakan Di Tingkat Propinsi, Kabupaten dan kota sangat beragam. Keberagaman ini, menjadikan situasi yang cukup sulit untuk melakukan pembenahan pembangunan peternakan nasional maupun regional, karena sistem birokrasinya akan menjadi kendala.



## Pasar Bebas dan Perubahan Pasar Domestik

Dalam pasar bebas, tataniaga tidak lagi diatur oleh pemerintah, oleh karenanya harga daging di dalam negeri akan berada pada posisi yang sama dengan harga daging di pasar dunia ( $H_d$ ). Secara rinci dapat dilihat kasus introduksi pasar global ke lokal pada Ilustrasi dibawah (Hirslifer, 1975). Pada tingkat harga tersebut produsen dalam negeri (peternak) hanya mampu memenuhi kebutuhan daging sebanyak  $X_1$ , sedangkan permintaan sebanyak  $X_2$ . Kekurangan daging sapi sebanyak ini akan diisi oleh daging impor sebanyak  $X_2 - X_1$ . Karena suplai daging di pasar internasional lebih elastis ( $S_w$ ) ketimbang suplai dalam negeri ( $S_{dn}$ ) maka dengan adanya impor, konsumen akan memperoleh *surplus* sebesar ( $H_d$  CBD). Ditinjau dari sisi upaya peningkatan gizi masyarakat hal ini sangat menguntungkan, karena konsumen menikmati daging sapi dengan harga murah. Namun, tidak demikian bagi peternak sapi potong rakyat.

Konsekuensi dari kebijakan penyatuan pasar domestik dengan pasar global (pasar bebas) adalah besarnya kebutuhan devisa untuk membeli daging. Disamping itu kebijakan ini tidak memberi rangsangan bagi peternak di dalam negeri, karena hanya menikmati surplus ekonomi yang lebih kecil ( $ACH_d$ ). Bila tidak ada perlindungan dari berbagai kebijakan pemerintah dikhawatirkan sebagian besar peternak sapi potong rakyat akan menghentikan usahanya.



Ilustrasi : Pengaruh Impor Sapi dan Daging terhadap Produsen Dan Konsumen di Dalam Negeri (Hirsleifer, 1985)

Secara teoritis masalahnya adalah bagaimana menggeser kurva  $S_{dn}$  ke sebelah kanan menjadi  $S_{dn}'$ . Hal ini, dimaksudkan agar pihak peternak di dalam negeri dapat pula menikmati lebih besar lagi nilai surplus ekonominya. Berbagai upaya untuk menuju kearah ini dapat dikemukakan dengan cara meningkatkan produktivitas sapi lokal sebagai berikut :

Secara *konservatif* peningkatan produktivitas sapi lokal yang biasa dilakukan pemerintah yaitu dengan berbagai cara misalnya ; program IB (inseminasi buatan) untuk memperpendek selang beranak, pembinaan kelompok tani/ternak secara teratur guna peningkatan keterampilan SDM, introduksi teknologi pakan guna peningkatan produksi dan efisiensi harga pakan, perbaikan tatalaksana dapat mempersingkat pemeliharaan dan mempercepat waktu jual, pengendalian penyakit ditujukan guna menekan tingkat kematian, introduksi modal usaha guna meningkatkan produktivitasnya dan lain sebagainya.

Selain hal tersebut, ada suatu konsep terobosan yaitu dengan cara membuat tingkat kelahiran sapi yang biasanya satu ekor menjadi kembar dua. Menurut pengalaman normatif, kelahiran sapi kembar dua dapat terjadi dengan peluang yang sangat kecil, yaitu sekitar 0,01 %. Berdasar pada peluang tersebut, kondisi ini mungkin dilakukan dengan harapan rata-rata sapi lokal dapat melahirkan kembar dua (*twin*). Peluang kelahiran kembar *twin* dapat dibuat dengan berbagai metoda. Misalnya secara hormonal, ditujukan agar terjadi ovulasi telur yang dimungkinkan pembuahan lebih dari satu atau dengan cara dilakukannya *embryo transfer*. Melalui seleksi pun rasanya masih mungkin dilakukan. Dimana kita dapat memilih induk sapi yang memiliki peluang kelahiran anak kembar. Rekayasa teknologi kearah kelahiran kembar, kiranya perlu di lakukan penelitian yang sangat intensif guna meningkatkan produktivitas sapi lokal. Terutama bagi sapi bali, sapi pesisir (di Sumbar), sapi PO (di Jawa), Sapi SO (NTB), sapi Aceh (NAD) yang telah terbukti memiliki keunggulan komparatif di negeri ini. Konsep kelahiran *twin*, sampai saat ini rasanya masih merupakan wacana bagi peternak yang menantang untuk diaplikasikan. Sehingga peningkatan produksi dan populasi sapi potong lokal akan mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang meningkat relatif lebih cepat.

Berbagai kajian tersebut pada prinsipnya secara teoritis ditujukan guna pergeseran fungsi produksi ke atas, serta menggeser kurva biaya marjinal ke kanan. Karena kurva penawaran konsumen merupakan kurva biaya marjinal, maka bila perbaikan produktivitas sapi potong lokal terus terjadi, maka kurva penawaran sapi potong akan menggeser ke kanan, yang artinya suplai akan bertambah diikuti dengan harga yang lebih murah. Pada kondisi inilah terjadi keunggulan kompetitif antara produk sapi lokal dengan impor. Artinya, peternak didalam negeri pun akan menikmati surplus ekonomi yang lebih baik ketimbang bila dilakukan impor sapi bakalan. Tentunya akan berakibat pula pada kegairahan usaha ternak sapi potong lokal yang mampu bersaing di era global. Sehingga sasaran program pemerintah terhadap kecukupan daging sapi pada tahun 2005, dengan peningkatan kelahiran dari 18,1% menjadi 20,99% (Dirjen Binprod Peternakan).

### **Perspektif Bisnis *Feedlot* di Indonesia**

Posisi Indonesia yang dekat dengan Australia sangat strategis dalam perdagangan sapi dunia. Ternyata dalam perdagangan tersebut, sejak pasca krisis ekonomi tahun 1997 importasi sapi-sapi dari Australia merupakan "*keberuntungan*" bagi Indonesia. Jika menyimak perjalanan bisnis ini pada tahun 1999 – 2000, dimana Australia secara besar-besaran melakukan impornya ke Timur Tengah dan saat itu, para *Feedloter* Indonesia hanya memperoleh *sisa ekspor* mereka, sehingga harga yang ditawarkan kepada importir Indonesia tentunya menjadi sangat murah. Realitanya pada tahun 2000, Indonesia mampu mengimpor

sekitar 296.ribuan ekor, seolah bisnis ini “sudah pulih” pasca krisis ekonomi. Kemudian, pada tahun 2001 dunia diguncang oleh kasus BSE, dampaknya konsumsi dunia akan daging sapi menurun sangat tajam, akibatnya ekspor sapi bakalan di Australia menurun drastis. Pada kondisi ini di Australia terjadi over suplai sehingga harga sapi menurun sangat tajam. Walaupun kondisi di Indonesia waktu itu, fluktuasi USD masih belum stabil, tetapi para *Feedloter* ternyata mampu melakukan impor cukup besar sekitar 289.000 ekor. Pada tahun 2002 yang lalu, Australia kembali dilanda kekeringan yang luar biasa, sehingga peternak di Australia harus segera menjual ternaknya secara besar-besaran, lagi-lagi kondisi tersebut sangat menguntungkan Indonesia yang secara geografis berlokasi sangat dekat dengan Australia. Pada tahun 2002, impor sapi kita dari Australia sangat spektakuler yaitu sekitar 430.000 ekor. Tahun 2003 pun bukan tanpa alasan yang menguntungkan, sebab pasar sapi Australia ke Timur tengah terganggu pula oleh perang di Irak dan fluktuasi Kurs mata uang di Mesir. Sehingga kapal-kapal pengangkut sapi ke Timur tengah dibebani biaya transpor yang melambung tinggi. Akibatnya, Indonesia pun mampu mengimpor cukup tinggi mencapai sekitar 95 % pada bulan April 2003 dari jumlah sapi pada bulan yang sama pada tahun 2002.

Pada tahun 2004-2005, bisnis *feedlot* di Indonesia mengalami ujian yang sangat berat. Mengingat dengan ditemukannya BSE pada bulan Desember 2003 dan bulan Juni 2005 yang lalu di USA, telah menyebabkan turunnya ekspor daging dari USA sekitar 83 % (USDA, 2004). Pangsa pasar ini kemudian dipenuhi oleh Australia, Brasilia, Argentina dan negara penghasil daging lainnya. Akibatnya, Indonesia akan kesulitan untuk memperoleh sapi bakalan dari Australia. Dampaknya, para *feedloter* akan mencari sapi-sapi bakalan dari dalam negeri. Pada kondisi ini terjadi distorsi pasar, antara para *feedloter* dengan para pedagang daging (jagal). Pasca ditemukannya BSE di USA tersebut, diikuti oleh masuknya daging ilegal ke negeri ini pada tahun 2004. Ternyata, distorsi pasar daging tersebut disebabkan oleh jeroan dan daging ilegal yang masuk ke pasar Industri baso.

Kondisi ini sebenarnya merupakan masa transisi yang sesungguhnya untuk mencapai suatu bisnis *feedlot* yang sesungguhnya. Artinya, pola perdagangan tradisional akan segera ditinggalkan untuk menuju bisnis perdagangan yang transparan. Maksudnya, semula transaksi kredit dengan pola taksir, akan berubah dengan sistem timbang berat badan melalui sistem tunai. Bila ini terjadi, para peternak sapi rakyat akan diuntungkan, sebab mereka akan memperoleh kepastian usaha yang menguntungkan.

Pemerintah harusnya segera mengantisipasi dengan cermat, agar tidak terjadi gejolak berkelanjutan. Terutama dalam pengadaan sapi siap potong bagi para pengusaha jagal. Cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan memfasilitasi sarana finansial, agar para pedagang yang terbiasa diberikan tenggang pembayaran, dialihkan fungsinya oleh lembaga keuangan yang ada.

### **Dampak sapi impor**

Dampak ekonomis yang diciptakan dari sapi adalah nilai tambah input yang digunakan untuk penggemukan sapi, terutama tenaga kerja dan bahan pakan. Bila dilihat dari aspek usaha budidaya sapi potong, manfaat usaha ini yang paling jelas

dirasakan adalah adanya penambahan bobot badan ternak yang dipelihara oleh peternak atau perusahaan penggemuka sapi potong (*feedlotter*), sedangkan terhadap sisi penawaran akan berdampak pada peningkatan produksi daging yang akan mengakibatkan menurunnya jumlah ternak yang dipotong. Disisi lain, usaha ini juga mendatangkan keuntungan bagi penduduk di sekitar wilayah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan maupun pertanian serta dapat menciptakan lapangan kerja dimana secara langsung akan meningkatkan perekonomian wilayah tersebut.

Jika kita melihat komponen kegiatan dari usaha budidaya sapi potong, masalah pemeliharaan dan pemberian pakan merupakan porsi yang cukup besar karena menyangkut makhluk biologis yang tidak bisa diabaikan. Waktu yang dicurahkan untuk mencari rumput, memberi pakan, dan membersihkan kandang merupakan salah satu dari betapa pentingnya kebutuhan tenaga kerja bagi peternakan rakyat maupun perusahaan, bahkan masalah tenaga kerja ini seringkali menjadi faktor penentu keberhasilan usaha budidaya sapi potong.

Bagi petani berlahan luas yang sekaligus pemilik ternak, seringkali mereka diharuskan mencari tenaga khusus untuk menangani ternaknya. Keadaan ini tentu saja menguntungkan bagi penduduk sekitar yang memerlukan pekerjaan. Sedangkan di pihak perusahaan peternakan, pengimpor sapi memerlukan tenaga kerja manusia mulai dari kegiatan pengangkutan ternak dari pelabuhan ke lokasi *feedlot*, pemeliharaan/penggemukan sampai ke pemasaran. Setiap perusahaan peternakan mempekerjakan tenaga kerja untuk bagian penggemukan (*livestock*), bagian *feedmill*, limbah, penunjang operasional serta staff kantor. Bagi perusahaan peternakan kebutuhan tenaga kerja akan lebih banyak dibandingkan dengan peternakan rakyat. Dengan adanya sebuah perusahaan penggemukan di suatu wilayah maka secara otomatis akan menciptakan tenaga kerja bagi penduduk sekitar. Tentu saja kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan beragam dari yang profesional sampai yang pekerja kasar. Minimal jika daerah tersebut tidak memiliki tenaga profesional, tapi setidaknya dapat menyediakan tenaga kerja lokal. Dari hasil penelitian Apfindo bekerjasama dengan Pusat Studi Pembangunan IPB, menyebutkan bahwa tenaga kerja yang terserap dari penggemukan 1.000 ekor sapi sebanyak 39 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Komposisi Tenaga Kerja dan Rasio Terhadap Jumlah Sapi yang Dipelihara**

Kegiatan usaha ternak	Kisaran (orang)	Rata-rata/1000 ekor Sapi (HKP)
Livestock/Kandang	23-37	18,69
Feedmill	5-20	7,79
Limbah	4-9	4,05
Staff	6-7	4,05
Penunjang	6-9	4,67
<b>Total</b>		<b>39,25</b>

Sumber : Dampak Impor Sapi Bakalan (Apfindo-PSP IPB, 2003)

Manfaat lain adalah hasil sampingan dari usaha penggemukan sapi potong yaitu, kotoran sapi yang diolah menjadi pupuk organik. Produk kotoran ternak,

merupakan pupuk lengkap yang mampu mengatasi kebutuhan pupuk anorganik seperti KCl, Urea, NPK, TSP dan jenis lainnya (sebagian besar pupuk anorganik tersebut diperoleh dari impor). Berdasarkan hasil analisis PT Lembu Jantan Perkasa (2001) bahwa dari 1.500 ekor sapi dapat dimanfaatkan kotorannya melalui teknologi prosesing akan mampu menghasilkan gas metan sekitar 5.425 meter kubik/hari, kompos padat 31.691 Kg/hari dengan total kandungan N sebesar 181 kg. Produksi tersebut dapat menghasilkan daya guna gas metan 1 meter kubik, untuk menjalankan mesin 1 Hp selama dua jam, memberikan daya listrik 1,25 KWH, memasak 3 jenis masakan untuk 5 orang/hari, penerangan lampu selama 6 jam (60 watt), menjalankan refrigerator selama 1 jam dan menjalankan inkubator selama 0,5 jam. Gas metan tersebut ekuivalen dengan 0,4 Kg minyak diesel (solar), 0,6 Kg minyak tanah, 0,8 Kg batu bara, Urea = 120,67 Kg dan TSP 83 Kg. Berdasarkan data tersebut kita dapat menghitung betapa besar manfaat kotoran sapi bagi pembangunan pertanian. Oleh karenanya, dengan pupuk kandang kita akan mampu menghemat devisa yang cukup berarti, disamping akan mampu meningkatkan kualitas tanah pertanian dan mengembangkan industri pendukung lainnya.

Selain dari pada itu limbah pertanian pun dapat dijadikan sumber pakan bagi industri penggemukan sapi potong, seperti jerami, limbah pengolahan kulit coklat, limbah kulit kopi, dan lain-lain. Hal tersebut secara langsung akan meningkatkan pendapatan di sektor pertanian, dimana dari hasil penelitian Apfindo, dari tiap 1.000 ekor sapi yang digemukan selama 90 hari komponen pakan dari kulit coklat/kopi sebanyak 17,47%, maka tiap ekor sapi yang digemukan mengkonsumsi 96,85 kg kulit coklat/kopi. Apabila 75% perusahaan menggunakan limbah tersebut, maka dari setiap 1.000 ekor sapi yang digemukan menghabiskan sekitar 72,64 ton kulit coklat/kopi. Bisa dibayangkan betapa besarnya efek ganda dari usaha penggemukan sapi potong terhadap sektor pertanian.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Apfindo dan PSP IPB (2003), manfaat yang ditimbulkan dari usaha penggemukan sapi potong impor adalah sebagai berikut (lihat Tabel 3):

**Tabel 2. Nilai Manfaat yang Ditimbulkan dari Impor Sapi 1.000 ekor**

<b>A</b>	<b>Biaya (Rp)</b>	-	<b>3.726.000.000</b>
<b>B</b>	<b>Benefit (Rp)</b>		<b>1.333.992.217</b>
	1. Margin Pemasaran	772.673.481	
	2. Margin Keuntungan Pemeliharaan	248.548.538	
	3. Retribusi RPH	9.240.000	
	4. Penyerapan Tenaga Kerja	20.579.992	
	5. Nilai Tambah Input	9.558.612	
	6. Nilai Tambah Industri Berbasis Sapi Potong	273.391.594	
<b>C.</b>	<b>Benefit/Cost Rasio (BCR): (B)/(A)</b>	-	<b>0,3580</b>

*Sumber : Dampak Impor Sapi Bakalan (Apfindo-PSP IPB, 2003)*

Pada tabel 3. diatas, besarnya nilai BCR dari impor sapi sebanyak 1.000 ekor adalah 0,3580. artinya setiap biaya yang dikeluarkan dari sapi impor sebesar Rp. 1,- akan memberikan *benefit* sebesar Rp. 0,3580 atau sebesar 35,8%. Nilai BCR ini

sangat tinggi, mengingat lama penggemukan rata-rata hanya 3 bulan, bahkan untuk sapi trading lebih singkat lagi yaitu sekitar 12 hari. Dengan menggunakan asumsi lama perputaran modal selama 3 bulan, maka dalam satu tahun besarnya manfaat dari impor sapi sekitar 107,4 % dari biaya yang dikeluarkan untuk mengimpor sapi. Besarnya nilai tersebut lebih besar daripada suku bunga bank komersial yang hanya sekitar 25-30 %. Artinya secara ekonomi bisnis sapi bakalan sangat menguntungkan, karena memiliki nilai BCR yang jauh lebih besar dari suku bunga bank.

### **Prospek Bisnis *Feedlot***

Dari sudut pandang Internal sebenarnya prospek bisnis *feedlot* sangat cerah mengingat efek ganda yang ditimbulkan dari usaha ini. Jika usaha ini berhenti pada saat sekarang, maka sekitar Rp. 80,00 milyar dalam setahun pendapatan masyarakat desa akan hilang begitu saja, di saat situasi perekonomian yang sangat sulit. Bayangkan saja, jika yang diimpor tersebut harus digemukkan minimal dalam kurun waktu 60 -100 hari, artinya pupuk, tenaga kerja, penambahan berat badan (nilai ini tidak kurang dari Rp 200.000,00 per ekor dengan jumlah sapi 400 ribu ekor), yang akan dinikmati oleh para petani/peternak dan pengusaha *feedlot* di dalam negeri akan hilang begitu saja, belum dihitung keuntungan yang hilang dari tulang, kulit, harga daging dan sebagainya. Oleh karena itu prospek bisnis *feedlot* masih sangat luas untuk dikembangkan, mengingat Indonesia merupakan surga bagi para pemasar barang.

Faktor external yang menjadi prospek pengembangan usaha ini di Indonesia adalah adanya kasus *Mad Cow*/BSE (di Eropah dan USA), kasus kuman *Anthrax*, dan bebasnya penyakit PMK dan BSE di Indonesia yang menyebabkan impor daging dari USA dan negara yang belum terbebas PMK telah dilarang masuk ke Indonesia oleh Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan Dep. Kesehatan, Departemen Pertanian dan Departemen Perindustrian. Larangan daging impor ini merupakan suatu prospek yang cerah bagi para *feedloter* dalam mengembangkan usahanya, karena mau tidak mau impor sapi bakalan harus ditingkatkan, karena sapi impor bakalan ini merupakan barang substitusi terhadap daging.

### **PENUTUP**

Prospek bisnis penggemukan sapi potong (*feedlot*) di Indonesia ternyata sangat menjanjikan. Selanjutnya, di era perdagangan bebas saat ini dan dalam rangka pengembangan agribisnis berbasis sapi potong harus berpedoman kepada, azas kelestarian sumberdaya ternak nasional, azas keseimbangan suplai demand dan azas kemandirian menuju kecukupan daging *bagi masyarakat*, melalui upaya-upaya yang harus ditempuh:

**Pertama;** Penataan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan peternakan sapi potong, dengan falsafah memberikan perlindungan bagi peternak sapi potong rakyat melalui kebijakan yang berkesetaraan dan berkeadilan, yaitu kebijakan yang sama bagi peternak sapi didalam negeri dengan kebijakan impornya.

**Kedua;** pemberdayaan peran swasta dalam mengoperasionalkan pembangunan peternakan khususnya sapi potong, antara lain : Masalah-masalah yang berkaitan dengan tataniaga tidak perlu diintervensi oleh pemerintah tetapi diserahkan

sepenuhnya pada mekanisme pasar. Pemerintah hanya berperan dalam penetapan kebijakan, pengawasan/ pengendalian dan pemberian sangsi.

**Ketiga;** Memberi dukungan bagi kegiatan usaha ternak budidaya sapi potong yang berbasis pengembangan usaha perbibitan. Misalnya, diberikannya insentif pada kegiatan impor, bea masuk, pajak, bunga, lahan dan penetapan fasilitas kredit khusus.

**Keempat;** dukungan sektor perbankan dan lembaga keuangan terhadap program yang menghasilkan daging. Realita menunjukkan kesulitan bagi para pengusaha dan peternak untuk memperoleh fasilitas tersebut. Khususnya, bagi para pengusaha *feedlot* yang melakukan kemitraan dengan peternak rakyat, diberikan insentif berupa bunga kredit murah (bersubsidi) dan kebijakan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Binprod Peternakan, (2004). Pokok-pokok Pemikiran tentang Pembangunan Peternakan 2005-2009. Disiapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, sebagai bahan diskusi perumusan Renstra, Renop, Penyusunan Peternakan Jangka Menengah Jakarta Juli 2004
- Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat (2003) Laporan Tahunan. Pemerintah Propinsi Jawa Barat Bandung.
- Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat (2003) Statistik. Pemerintah Propinsi Jawa Barat Bandung.
- DPP PPSKI (2005) Kontribusi Peternakan Sapi Potong Dan Sapi Perah Terhadap Pembangunan Nasional Dan Kesejahteraan Peternak Rakyat, RDP DPR-RI.
- Heady. E.O. dan J Dillon. (1969). Agricultural Production Function. Ames Iowa State University Press.
- Hirshleifer Jack (1985) Teori Haega dan Penerapannya, Terjemahan oleh Kusnedi. Penerbit Erlangga Jakarta
- Kikuchi, M. (1984). Factor Share in Agricultural Production : Definition, Estimation, and Application in Basic Procedures for Agro Economic Research IRRI Manila. Philippines.
- Monke, Eric A. and Scott R. Pearson. (1989). The Policy Analysis Matrix for Agriculture Development. Cornell University Press. Ithaca and London.
- PSP IPB - APFINDO (2003) Dampak Impor Sapi bakalan, Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB.
- Rochadi Tawaf, dan Sri Rayahu. (2003) Analisis Kelayakan Usaha Kemitraan Sapi potong, Sapi perah dan Ayam Ras. Kerjasama Dinas Peternakan Jawa Barat dan Fapet Unpad
- Rochadi Tawaf (2004). Dampak Kebijakan otonomi Daerah Dalam Menjamin Keamanan dan Ketahanan Pangan Nasional. Seminar seri keamanan pangan Food Safety Seminar, ISPI dan PDHI, Jakarta 25 Agustus 2004.
- Rochadi Tawaf dan Sondi Kuswaryan (2004). Tata Niaga Peternakan Jawa Barat, Kerjasama Fakultas Peternakan Unpad dengan Dinas Peternakan Jawa Barat.
- Rochadi Tawaf (2005). Pengaruh Impor Jeroan Dan Daging Sapi (Illegal) Terhadap Perkembangan Usaha Dan Industri Sapi Potong Di Dalam Negeri. Makalah Puslitbang Perternakan Bogor.
- Rochadi Tawaf (2006) Perspektif Kecukupan Daging 2010, seminar Pasca Sarjana Unpad
- Saragih, B. dan T. Sipayung (2000). Membangun Perekonomian Daerah Yang Berkeadilan dan Berdaya Saing melalui Pembangunan Sistem Agribisnis. Seminar Evaluasi dan Prospek Serta Kebijakan Pembangunan Pertanian Berbudaya Industri di Daerah Lampung. Unila Bandar Lampung
- Tjeppy D. Soedjana (2006) Strategi dan Kebijakan Pencapaian Program Kecukupan Daging 2010. Direktorat Jenderal Peternakan Jakarta.